

REKOMENDASI HASIL PEMETAAN RISIKO PENYAKIT POLIO



**DINAS KESEHATAN KOTA PAREPARE
TAHUN 2025**

1. Pendahuluan

a. Latar belakang penyakit

Virus Polio adalah Virus yang termasuk dalam golongan Human Enterovirus yang bereplikasi di usus dan dikeluarkan melalui tinja. Virus Polio terdiri dari 3 strain yaitu strain-1 (Brunhilde), strain-2 (Lansig), dan strain-3 (Leon), termasuk family Picornaviridae. Penyakit ini dapat menyebabkan kelumpuhan dengan kerusakan motor neuron pada cornu anterior dari sumsum tulang belakang akibat infeksi virus.

Kebanyakan orang yang terinfeksi (90%) tidak mengalami gejala atau gejala yang sangat ringan dan biasanya tidak dikenali. Pada kondisi lain gejala awal yaitu Demam, kelelahan, sakit kepala, muntah, kekakuan di leher dan nyeri di tungkai.

Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dalam menangani wabah virus polio ini. Dengan adanya resolusi WHO dan program The Global Polio Eradication Initiative pada tahun 1988, Indonesia telah melaksanakan program imunisasi nasional polio selama 3 tahun berturut-turut pada tahun 1995, 1996 dan 1997, serta telah berhasil memberantas virus polio di Indonesia sejak tahun 1996. Namun pada 13 Maret 2005 ditemukan kasus polio pertama di Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Sehingga dalam kurun waktu 2005 sampai awal 2006, kasus polio tersebut berkembang menjadi KLB yang menyerang 305 orang, dan tersebar di 47 kabupaten/ kota di 10 provinsi di Indonesia.

Dalam dua tahun terakhir, tingkat vaksinasi anak secara global terhadap polio dan program vaksinasi lainnya termasuk di Indonesia, mengalami penurunan yang drastis akibat dampak dari pandemi COVID-19. Hal ini dapat berakibat pada penyebaran kembali virus polio di beberapa negara termasuk di Indonesia. Oleh sebab itu, cakupan vaksinasi polio harus tetap tinggi dan upaya pengawasan perlu terus ditingkatkan. Penemuan kasus polio baru-baru ini, termasuk di negara-negara yang selama beberapa dekade tidak ditemukan lagi kasus polio, merupakan peringatan kuat bahwa setiap negara tetap berisiko mengalami munculnya kembali kasus polio sampai virus polio diberantas di seluruh dunia.

Imunisasi merupakan kunci penting dalam upaya pencegahan kasus polio. Upaya untuk meningkatkan capaian dan cakupan imunisasi perlu terus ditingkatkan. Selain itu pemerintah perlu memastikan sistem surveilans kesehatan berjalan secara optimal, dan peningkatan edukasi dan komunikasi kepada masyarakat melalui kerjasama para pemangku kepentingan termasuk peran aktif para tokoh masyarakat untuk berkomitmen guna terus mempertahankan status bebas polio ini di Indonesia.

b. Tujuan

1. Memberikan panduan bagi daerah dalam melihat situasi dan kondisi penyakit infeksi emerging dalam hal ini penyakit Polio.
2. Dapat mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan kejadian penyakit infeksi emerging di daerah Kabupaten.
3. Dapat di jadikan dasar bagi daerah dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan penyakit infeksi emerging ataupun penyakit yang berpotensi wabah/KLB.

2. Hasil Pemetaan Risiko

a. Penilaian ancaman

Penetapan nilai risiko ancaman Polio terdapat beberapa kategori, yaitu T/tinggi, S/sedang, R/rendah, dan A/abai, Untuk Kabupaten Kota Parepare, kategori tersebut dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

NO	KATEGORI	SUBKATEGORI	NILAI PERKATEGORI	BOBOT (B)	INDEK (NB)
1	Karakteristik Penyakit	Karakteristik Penyakit (literatur/tim ahli)	T	13.55	13.55
2	Pengobatan	Pengobatan (literatur/tim ahli)	T	1.91	1.91
3	Metode Penanggulangan Penularan Penyakit	Metode Penanggulangan Penularan Penyakit (literatur/tim ahli)	S	10.50	1.05
4	Pencegahan Penularan Penyakit di Masyarakat	Pencegahan Penularan Penyakit Perorangan (literatur/tim ahli)	A	13.16	0.01
5	Pencegahan Penularan Penyakit di Masyarakat	Pencegahan Penularan Penyakit di Masyarakat (literatur/tim ahli)	S	13.95	1.40
6	Risiko Importasi	Risiko Importasi deklarasi PHEIC - WHO (literatur/tim ahli)	T	8.47	8.47
7	Risiko importasi	Risiko Importasi POLIO di wilayah Indonesia	S	8.47	0.85
8	Risiko penularan setempat	Risiko penularan setempat	A	8.71	0.01
9	Dampak wilayah	Dampak wilayah (periode KLB)	S	6.01	0.60
10	Dampak ekonomi	Dampak ekonomi saat terjadi keadaan KLB	R	6.81	0.07
11	Dampak ekonomi	Dampak ekonomi saat tidak terjadi KLB (AFP)	R	5.22	0.05
12	Dampak Sosial	Perhatian media	R	3.24	0.03

Tabel 1. Penetapan Nilai Risiko Polio Kategori Ancaman Kabupaten Kota Parepare Tahun 2024

Berdasarkan hasil penilaian ancaman pada penyakit Polio terdapat 3 subkategori pada kategori ancaman yang masuk ke dalam nilai risiko Tinggi, yaitu :

1. Subkategori Karakteristik Penyakit (literatur/tim ahli), alasan sudah menjadi ketetapan ahli
2. Subkategori Pengobatan (literatur/tim ahli), alasan sudah menjadi ketetapan ahli
3. Subkategori Risiko Importasi deklarasi PHEIC - WHO (literatur/tim ahli), alasan sudah menjadi ketetapan ahli

Berdasarkan hasil penilaian ancaman pada penyakit Polio terdapat 4 subkategori pada kategori ancaman yang masuk ke dalam nilai risiko Sedang, yaitu :

1. Subkategori Metode Penanggulangan Penularan Penyakit (literatur/tim ahli), alasan sudah menjadi ketetapan ahli
2. Subkategori Pencegahan Penularan Penyakit di Masyarakat (literatur/tim ahli), alasan sudah menjadi ketetapan ahli

3. Subkategori Risiko Importasi POLIO di wilayah Indonesia, alasan karena pada tahun 2024 di laporkan kasus polio di Indonesia
4. Subkategori Dampak wilayah (periode KLB), alasan karena pada tahun 2024 di laporkan kasus polio di Indonesia

b. Penilaian Kerentanan

Penetapan nilai risiko Kerentanan Polio terdapat beberapa kategori, yaitu T/tinggi, S/sedang, R/rendah, dan A/ abai, kategori tersebut dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

NO	KATEGORI	SUBKATEGORI	NILAI PER KATEGORI	BOBOT (B)	INDEX (NXB)
1	Karakteristik Penduduk	Kepadatan Penduduk	T	13.64	13.64
2	Ketahanan Penduduk	% cakupan imunisasi polio 4	S	27.99	2.80
3	Ketahanan Penduduk	% perilaku sehat (CTPS, PAMMK, SBABS)	R	31.10	0.31
4	Karakteristik Lingkungan Berisiko	% sarana air minum tidak diperiksa dan tidak memenuhi syarat	A	20.74	0.02
5	Transportasi Antar Kab/Kota/ Provinsi	Transportasi Antar Kab/Kota/Provinsi	T	6.53	6.53

Tabel 2. Penetapan Nilai Risiko Polio Kategori Kerentanan Kabupaten Kota ParePare Tahun 2024

Berdasarkan hasil penilaian kerentanan pada penyakit Polio terdapat 2 subkategori pada kategori kerentanan yang masuk ke dalam nilai risiko Tinggi, yaitu :

1. Subkategori Kepadatan Penduduk, alasan karena kepadatan penduduk sebesar 1.614 orang/km². Kepadatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain luas wilayah Kota Parepare (99,33 km²) mempengaruhi kepadatan secara langsung. Selain itu faktor tingkat urbanisasi, aktivitas ekonomi, pekerjaan, ketersediaan infrastruktur seperti pelabuhan dan fasilitas pendidikan tinggi di kota Parepare juga menjadi faktor kepadatan penduduk di Kota Parepare.
2. Subkategori Transportasi Antar Kab/Kota/Provinsi, alasan karena adanya transportasi laut (terdapat pelabuhan domestik) dan transportasi antara kabupaten kota setaip dari dari kota Parepare

Berdasarkan hasil penilaian kerentanan pada penyakit Polio terdapat 1 subkategori pada kategori kerentanan yang masuk ke dalam nilai risiko Sedang, yaitu :

1. Subkategori % cakupan imunisasi polio 4, alasan karena cakupan imunisasi polio 4 di Kota Parepare pada tahun 2024 sebesar 74,21 %

c. Penilaian kapasitas

Penetapan nilai risiko Kapasitas Polio terdapat beberapa kategori, yaitu T/tinggi, S/sedang, R/rendah, dan A/ abai, kategori tersebut dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini

NO	KATEGORI	SUBKATEGORI	NILAI PER KATEGORI	BOBOT (B)	INDEX (NXB)
1	Kebijakan publik	Kebijakan publik	R	3.52	0.04
2	Kelembagaan	Kelembagaan	S	3.52	0.35
3	Program pencegahan dan pengendalian	Program imunisasi	S	7.75	0.78
4	Program pencegahan dan pengendalian	Pengobatan massal (PIN Polio)	S	2.37	0.24
5	Program pencegahan dan pengendalian	Pengendalian lingkungan dan Perilaku	T	3.15	3.15
6	Kualitas program pencegahan dan pengendalian PIE	Kualitas program pencegahan dan pengendalian PIE	S	6.66	0.67
7	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	S	3.40	0.34
8	Surveilans	Surveilans (SKD)	R	8.89	0.09
9	Surveilans	Sasaran deteksi dini kasus Polio (human diseases surveillance)	T	7.06	7.06
10	Surveilans	Pelaksanaan Deteksi Dini Polio di Fasyankes (Puskesmas)	S	9.08	0.91
11	Surveilans	Pelaksanaan Deteksi Dini Polio di Fasyankes (RS)	T	11.20	11.20
12	Surveilans	Surveilans AFP	R	10.10	0.10
13	PE dan penanggulangan KLB	PE dan penanggulangan KLB	R	12.06	0.12
14	Kapasitas Lab	Kapasitas Laboratorium	R	1.75	0.02
15	Promosi	Media Promosi Kesehatan	T	9.48	9.48

Tabel 3. Penetapan Nilai Risiko Polio Kategori Kapasitas Kabupaten Kota Parepare Tahun 2024

Berdasarkan hasil penilaian kapasitas pada penyakit Polio terdapat 0 subkategori pada kategori kapasitas yang masuk ke dalam nilai risiko Abai.

Berdasarkan hasil penilaian kapasitas pada penyakit Polio terdapat 5 subkategori pada kategori kapasitas yang masuk ke dalam nilai risiko Rendah, yaitu :

1. Subkategori Kebijakan publik, alasan karena belum ada kebijakan kewaspadaan Polio yang diterbitkan, tetapi tetap menjadi perhatian di tingkat kepala bidang terkait.
2. Subkategori 8a. Surveilans (SKD), alasan karena masih ada Sebagian kecil anggota tim memiliki sertifikat pelatihan kewaspadaan dini penyakit, termasuk Polio
3. Subkategori Surveilans AFP, alasan karena capaian Non Polio AFP Rate tidak mencapai target pada tahun 2024
4. Subkategori PE dan penanggulangan KLB, alasan hanya sekitar 25 % anggota TGC di Kota Parepare yang telah memiliki sertifikat pelathan penyelidikan dan penanggulangan KLB, termasuk Polio dan pedoman umum, namun belum dilengkapi dengan POS/SOP wilayah setempat
5. Subkategori Kapasitas Laboratorium, alasan karena waktu yang diperlukan (hari) untuk memperoleh konfirmasi hasil pemeriksaan spesimen popio selama 14 hari.

d. Karakteristik risiko (tinggi, rendah, sedang)

Penetapan nilai karakteristik risiko penyakit Polio didapatkan berdasarkan pertanyaan dari pengisian Tools pemetaan yang terdiri dari kategori ancaman, kerentanan, dan kapasitas, maka di dapatkan hasil karakteristik risiko tinggi, rendah, dan sedang. Untuk karakteristik resiko Kabupaten Kota Parepare dapat di lihat pada tabel 4.

Provinsi	Sulawesi Selatan
Kota	Kota Parepare
Tahun	2025

RESUME ANALISIS RISIKO POLIO	
Ancaman	28.00
Kerentanan	23.30
Kapasitas	34.55
RISIKO	18.88
Derajat Risiko	SEDANG

Tabel 4. Penetapan Karakteristik Risiko Polio Kabupaten Kota ParePare Tahun 2024.

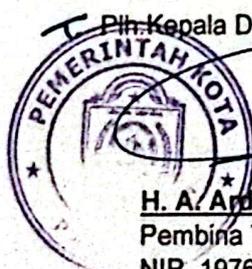
Berdasarkan hasil dari pemetaan risiko Polio di Kabupaten Kota Parepare untuk tahun 2024, dihasilkan analisis berupa nilai ancaman sebesar 28.00 dari 100, sedangkan untuk kerentanan sebesar 23.30 dari 100 dan nilai untuk kapasitas sebesar 34.55 dari 100 sehingga hasil perhitungan risiko dengan rumus Nilai Risiko = (Ancaman x Kerentanan)/ Kapasitas, diperoleh nilai 18.88 atau derajat risiko SEDANG

3. Rekomendasi

NO	SUBKATEGORI	REKOMENDASI	PIC	TIMELINE	KET
1	% cakupan imunisasi polio 4	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan edukasi tentang manfaat imunisasi melalui berbagai media edukatif Pengusulan rencana pelatihan tim imunisasi & Tim TGC 	Pengelola program Promkes, pengelola Imunisasi & Pengelola Surveilans	Juli - November 2025	
2	% perilaku sehat (CTPS, PAMMK)	Meningkatkan edukasi melalui berbagai media edukatif terkait penerapan PHBS, CTPS, dan pengelola air /makanan	Penanggung Jawab Kesehatan lingkungan & program Promkes	Juli - November 2025	
3	PE dan penanggulangan KLB	Pengusulan rencana kegiatan Peningkatan kompetensi nakes/tim TGC terkait penanganan dan kewaspadaan penyakit Polio	Agar kiranya Kementerian Kesehatan melalui anggaran DAK non fisik membuka lokus untuk pelatihan peningkatan kapasitas nakes/tim TGC Kota Parepare terkait penanganan dan kewaspadaan penyakit infeksi emerging tahun 2026	Pengelola program Surveilans	September 2025
4	Surveilans AFP	Melaksanakan workshop/bimbingan teknis pelaporan surveilans AFP, Teknik HRR dan zero reporting	Penanggung jawab Surveilans & Promkes	Juli - November 2025	
5	Kebijakan publik	Advokasi penerbitan Kebijakan lokal (surat edaran) sehubungan dengan kewaspadaan penyakit Polio di Kota Parepare	Penanggung Jawab Surveilans Dinkes	Agustus 2025	

Parepare, 16 Juni 2025

Pih. Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare



H. A. Ardian Asyraq R.

H. A. Ardian Asyraq R, S.Sos, M.Si
 Pembina Tingkat I, IV/b
 NIP. 19760707 199703 1 012

TAHAPAN MEMBUAT DOKUMEN REKOMENDASI DARI HASIL ANALISIS RISIKO PENYAKIT POLIO

Langkah pertama adalah **MERUMUSKAN MASALAH**

1. MENETAPKAN SUBKATEGORI PRIORITAS

Subkategori prioritas ditetapkan dengan langkah sebagai berikut:

- a. Memilih maksimal lima (5) subkategori pada setiap kategori kerentanan dan kapasitas
- b. Lima sub kategori kerentanan yang dipilih merupakan subkategori dengan nilai risiko kategori kerentanan tertinggi (urutan dari tertinggi: Tinggi, Sedang, Rendah, Abai) dan bobot tertinggi
- c. Lima sub kategori kapasitas yang dipilih merupakan subkategori dengan nilai risiko kategori kapasitas terendah (urutan dari terendah: Abai, Rendah, Sedang, Tinggi) dan bobot tertinggi

2. Menetapkan Subkategori yang dapat ditindaklanjuti

- a. Dari masing-masing lima Subkategori yang dipilih, ditetapkan masing-masing maksimal tiga subkategori dari setiap kategori kerentanan dan kapasitas.
- b. Pemilihan tiga subkategori berdasarkan bobot tertinggi (kerentanan) atau bobot terendah (kapasitas) dan/atau pertimbangan daerah masing-masing.
- c. Untuk penyakit MERS, subkategori pada kategori kerentanan tidak perlu ditindaklanjuti karena tindak lanjutnya akan berkaitan dengan kapasitas.
- d. Kerentanan tetap menjadi pertimbangan dalam menentukan rekomendasi.

Tabel Isian :

Penetapan Subkategori prioritas pada kategori kerentanan

No	Subkategori	Bobot	Nilai Risiko
1	Kepadatan Penduduk	13.64	T
2	Transportasi Antar Kab/Kota/Provinsi	6.53	T
3	% cakupan imunisasi polio 4	27.99	S
4	% perilaku sehat (CTPS, PAMMK, SBABS)	31.10	R
5	% sarana air minum tidak diperiksa dan tidak memenuhi syarat	20.74	A

Penetapan Subkategori yang dapat ditindaklanjuti pada kategori kerentanan

No	Subkategori	Bobot	Nilai Risiko
1	% cakupan imunisasi polio 4	27.99	S
2	% perilaku sehat (CTPS, PAMMK, SBABS)	31.10	R

Penetapan Subkategori prioritas pada kategori kapasitas

No	Subkategori	Bobot	Nilai Risiko
1	PE dan penanggulangan KLB	12.06	R
2	Surveilans AFP	10.10	R
3	8a. Surveilans (SKD)	8.89	R
4	Kebijakan publik	3.52	R
5	Kapasitas Laboratorium	1.75	R

Penetapan Subkategori yang dapat ditindaklanjuti pada kategori kapasitas

No	Subkategori	Bobot	Nilai Risiko
1	PE dan penanggulangan KLB	12.06	R
2	Surveilans AFP	10.10	R
3	Kebijakan publik	3.52	R

3. Menganalisis inventarisasi masalah dari setiap subkategori yang dapat ditindaklanjuti

- a. Memilih minimal satu pertanyaan turunan pada subkategori prioritas dengan nilai jawaban paling rendah/buruk
- b. Setiap pertanyaan turunan yang dipilih dibuat inventarisasi masalah melalui metode 5M (man, method, material, money, dan machine).

Kerentanan

No	Subkategori	Man	Method	Material	Money	Machine
1	% cakupan imunisasi polio 4	Munculnya keraguan atau penolakan imunisasi karena hoaks/misinformasi. Sehingga orang tua kurang memahami atau enggan membawa anak ke posyandu/puskesmas untuk di imunisasi	Kurangnya follow-up anak yang belum lengkap imunisasi	ada perbedaan data sasaran Pusdatin dengan data rill di kota Parepare Pernah terjadi kekosongan vaksin	Kurangnya anggaran untuk edukasi masyarakat, pelatihan petugas dan kegiatan imunisasi tambahan dan outreach	
2	% perilaku sehat (CTPS, PAMMK)	Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penerapan PHBS, CTPS dan pengelolaan air/makanan.	masyarakat belum menerapkan cara CTPS dengan benar, ada yang mencuci tangan namun tidak memakai sabun.	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas cuci tangan tidak tersedia di sebagian kecil rumah tangga. • Tidak semua rumah tangga memiliki tempat penyimpanan air dan makanan yang higienis. 	Terbatasnya anggaran untuk promosi kesehatan dan penyediaan sarana CTPS	

Kapasitas

No	Subkategori	Man	Method	Material	Money	Machine
1	PE dan penanggulangan KLB	Nakes dan tim TGC belum mendapatkan pelatihan kewaspadaan penyakit infeksi emerging termasuk Polio			Keterbatasan pendanaan untuk pelaksanaan pelatihan	

2	Surveilans AFP	Kurangnya pemahaman tentang defenisi dan pelaporan AFP.	Zero reporting tidak berjalan konsisten dan HRR tidak rutin dilaksanakan (belum semua faskes memiliki dan menjalankan SOP pelaporan)		Terbatasnya anggaran surveilans	Kurangnya perangkat untuk rekapitulasi digital HRR
3	Kebijakan publik		Belum ada penerbitan kebijakan lokal (Perda/surat edaran) yang keluaran terkait kewaspadaan penyakit Polio			

4. Poin-point masalah yang harus ditindaklanjuti

1. Kurangnya anggaran untuk pelatihan petugas, edukasi masyarakat, dan kegiatan kewaspadaan penyakit polio
2. Munculnya keraguan atau penolakan imunisasi karena hoaks/misinformasi. Sehingga orang tua kurang memahami atau enggan membawa anak ke posyandu/puskesmas untuk di imunisasi
3. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penerapan PHBS, CTPS dan pengelolaan air/makanan.
4. Nakes dan tim TGC belum mendapatkan pelatihan kewaspadaan penyakit infeksi emerging termasuk Polio
5. Kurangnya pemahaman tentang defenisi dan pelaporan AFP sehingga Zero reporting tidak berjalan konsisten dan HRR tidak rutin dilaksanakan (belum semua faskes memiliki dan menjalankan SOP pelaporan)
6. Belum ada penerbitan kebijakan lokal (Perda/surat edaran) yang keluaran terkait kewaspadaan penyakit Polio

5. Rekomendasi

NO	SUBKATEGORI	REKOMENDASI	PIC	TIMELINE	KET
1	% cakupan imunisasi polio 4	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan edukasi tentang manfaat imunisasi melalui berbagai media edukatif • Pengusulan rencana pelatihan tim imunisasi & Tim TGC 	Pengelola program Promkes, pengelola Imunisasi & Pengelola Surveilans	Juli - November 2025	

2	% perilaku sehat (CTPS, PAMMK)	Meningkatkan edukasi melalui berbagai media edukatif terkait penerapan PHBS, CTPS, dan pengelola air /makanan	Penanggung Jawab Kesehatan lingkungan & program Promkes	Juli - November 2025	
3	PE dan penanggulangan KLB	Pengusunan rencana kegiatan Peningkatan kompetensi nakes/tim TGC terkait penanganan dan kewaspadaan penyakit Polio	Agar kiranya Kementerian Kesehatan melalui anggaran DAK non fisik membuka lokus untuk pelatihan peningkatan kapasitas nakes/tim TGC Kota Parepare terkait penanganan dan kewaspadaan penyakit infeksi emerging tahun 2026	Pengelola program Surveilans	September 2025
4	Surveilans AFP	Melaksanakan workshop/bimbingan teknis pelaporan surveilans AFP, Teknik HRR dan zero reporting	Penanggung jawab Surveilans & Promkes	Juli - November 2025	
5	Kebijakan publik	Advokasi penerbitan Kebijakan lokal (surat edaran) sehubungan dengan kewaspadaan penyakit Polio di Kota Parepare	Penanggung Jawab Surveilans Dinkes	Agustus 2025	

6. Tim penyusun

No	Nama	Jabatan	Instansi
1	Edy Kusuma Suhardi, SKM	Kabid Kesmas, Kesling, P2P	Dinas Kesehatan
2	Hardianti, A, SKM, MKM	Pengelola Surveilans	Dinas Kesehatan
3	Marcelina Marthen, S.Kep,Ns	Pengelola Imunisasi	Dinas Kesehatan
4	Aisyah, SKM, M.Kes	Pengelola Promkes	Dinas Kesehatan
5	Fitriani, SKM	Pengelola Kesling	Dinas Kesehatan
6	Ikbal, SKM	Pengelola Kesling	Dinas Kesehatan